



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 6 (Enam)
Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI.
Hari, Tanggal	: Senin, 2 September 2024
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Aria Bima/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmi, S.E., M.Si./Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.
A c a r a	: Pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none">1. RKA KL Tahun Anggaran 2025 (Pagu Anggaran);2. Pelaksanaan anggaran TA 2023 s.d triwulan II TA 2024;3. Permasalahan PT Indonesia Farma, Tbk (Indofarma), dan4. Lain-lain..
Hadir	: 1. 15 Orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri BUMN RI, Sdr. Erick Thohir; Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI beserta jajarannya pada Pukul 10.56 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 2 September 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Aria Bima dan dilanjutkan oleh Bapak Martin Manurung, S.E., M.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI terkait Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk meningkatkan Realisasi Anggaran Tahun 2024 mengingat realisasi anggaran sampai Triwulan II baru mencapai Rp. 119,75 Miliar atau 42,11% dari Pagu Anggaran Kementerian BUMN 2024 sebesar Rp. 284,4 Miliar.
3. Komisi VI DPR RI menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri BUMN RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2024 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.480/D.8/PP.04.03/07/2024 dimana Pagu Anggaran Kementerian BUMN RI tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp277.498.437.000 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dengan perincian:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp197.404.884.000 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - b. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN Sebesar Rp80.093.553.000 (*Delapan Puluh Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp66.644.541.000 (*Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) untuk kebutuhan prioritas yang belum diakomodir dengan perincian:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp23.929.386.000 (*Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - b. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN Sebesar Rp42.415.155.000 (*Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI terkait kinerja BUMN selama periode 2020-2023, baik dalam hal kontribusi dividen maupun penyerapan Penyertaan Modal Negara (PMN).
6. Kementerian BUMN RI bersepakat dengan Komisi VI DPR RI untuk segera mendorong penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh PT Indofarma Tbk dan hak pensiunan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 12.22 WIB.

MENTERI BUMN RI

Ttd.

ERICK THOHIR

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MARTIN MANURUNG, S.E., M.A
A-352**